I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diuraikan ke dalam pembangunan daerah-daerah, meskipun hanya menampilkan program sektoral umumnya telah diklasifikasikan kedalam pendekatan regional. Disini ditekankan pada perencanaan dengan sebanyak mungkin partisipasi dari bawah (daerah). Selangkah lebih maju dari pengertian tersebut ialah pemberian aksentuasi keterpaduan antar sektor. Diharapkan agar masing-masing sektor dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dengan berfungsinya sektor-sektor secara baik, maka daerah yang bersangkutan akan berkembang dengan baik. Namun betapapun baiknya hasil yang dicapai, kesemuanya itu masih tergolong pada pendekatan setiap kegiatan usaha memanfaatkan ruang wilayah, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak dalam ruang wilayah tertentu (Adisasmita, 2014).

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu transformasi perubahan struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan–perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Proses perubahan struktur ekonomi melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor, sektor perekonomian daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang besar tentunya didukung oleh potensi perekonomian daerah yang ikut andil dalam proses pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari yang namanya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Menurut Boediono (1985):" Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka waktu panjang." Namun juga pertumbuhan ekonomi wilayah seringkali dikonotasikan sebagai upaya peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Dalam hal ini, pertumbuhan dimaksud adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) (Tarigan, 2007).

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial. Dalam pengembangan wilayah perumbuhan seyogyanya menerapkan pendekatan "kakak-beradik" yang dimaksud dalam suatu wilayah pertumbuhan Provinsi, kabupaten yang maju harus mendorong dan menarik kabupaten-kabupaten yang kurang maju, yang diharapkan dalam jangka panjang mendatang, kabupaten yang kurang maju, dengan demikian

kesenjangan antar kabupaten dapat meminimalisir, yang berarti telah dicapai pemerataan pembangunan ke seluruh bagian wilayah (Adisasmita, 2014).

Salah satu konsep yang penting dalam pembangunan ekomomi regional adalah konsep Produk Domestik Bruto (PDRB). Untuk dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dapat kita lihat melalui data dari pendapatan regional daerah tersebut. PDRB di Indonesia pada dasarnya terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan dan konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan yang terakhir sektor jasa-jasa (BPS Sumut, 2012).

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan Negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan/kelautan. Akibatnya

daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak (Arsyad,1999).

Pertumbuhan ekonomi sering mengalami kesenjangan antar wilayah terkait dengan salah satu faktor yang berpengaruh yaitu terjadinya kesenjangan dalam tingkat hierarki pusat-pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan yang memiliki tingkat hierarki tinggi akan menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tinggi. Sebaliknya pusat pertumbuhan yang memiliki tingkat hierarki rendah, pertumbuhan wilayahnya rendah, sehingga mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, karena pembangunan wilayah yang tidak berkeseimbangan tingkat kesenjangan dalam tingkat hierarki pusat tetap diperlukan, karena keberadaan pusat-pusat yang berbeda-beda tingkat hierarkinya dan ordenya tersebar diwilayah pertumbuhan, tersusun secara hierarkis. Salah satu strategi pembangunan dalam Trilogi Pembangunan adalah melaksanakan pemerataan pembangunan, di samping mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis (Adisasmita, 2014).

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan basis atau unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama

yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan kualitas perencanaan daerah. Perencanaan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi karakteristik suatu daerah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mengelola secara baik sumber daya yang dimiliki suatu daerah agar memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan daerah lainnya, sehingga akan menimbulkan laju pembangunan daerah. Pembangunan suatu daerah akan meningkatkan perekonomian daerah jika dalam pelaksanaanya didorong dengan laju pertumbuhan yang baik

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi dan analisis sektor ekonomi yang menjadi unggulan dalam perencanaan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan perbandingan terhadap kondisi perekonomian nasional sangat penting dikaji secara lebih terinci, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih dikembangkan. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang layak dikembangkan, maka strategi dan perencanaan pembangunan , terutama di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih terarah sehingga merangsang terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Sektor-sektor apa sajakah yang menjadi sektor basis dan non basis di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana saja kontribusi sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara terhadap kontribusi sektor ekonomi nasional ?
3. Bagaimana Pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor ekonomi nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui kontribusi sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor ekonomi nasional.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor ekonomi nasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan, maupun peneliti lain yang inginmengembangkan dan melanjutkan penelitian ini.
2. Sebagai bahan-bahan informasi yang mampu menjadikan acuan kebijakan, perencanaan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.